

**PERBEDAAN PERSEPSI ANTARA PIHAK INTERNAL INSTANSI
PEMERINTAH DENGAN AUDITOR BPKP TENTANG ASPEK PENYEBAB
FRAUD PENGADAAN BARANG/JASA PADA LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROPINSI SUMATERA BARAT**
(Studi Empiris pada SKPD Kabupaten/Kota dan auditor BPKP Sumatra Barat)

ARTIKEL ILMIAH

*Diajukan Sebagai Salah Satu Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh:
HELJAPRI
05216/2008

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2015**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PERBEDAAN PERSEPSI ANTARA PIHAK INTERNAL INSTANSI
PEMERINTAH DENGAN AUDITOR BPKP TENTANG ASPEK PENYEBAB
FRAUD PENGADAAN BARANG/JASA PADA LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROPINSI SUMATERA BARAT
(Studi Empiris pada SKPD Kabupaten/Kota dan auditor BPKP Sumatra Barat)**

Oleh:
HELJAPRI
05216/2008

Artikel ini disusun berdasarkan skripsi/tesis untuk persyaratan wisuda periode
Maret 2015 dan telah diperiksa/disetujui oleh kedua pembimbing.

Padang, Januari 2015

Pembimbing 1



Herlina Helmy, SE, Akt, M.S.AK
NIP. 19820511 200501 2 002

Pembimbing II



Charoline Cheisviyanni, SE, M, Ak
NIP. 19801019 200604 2 002

**PERBEDAAN PERSEPSI ANTARA PIHAK INTERNAL INSTANSI
PEMERINTAH DENGAN AUDITOR BPKP TENTANG ASPEK PENYEBAB
FRAUD PENGADAAN BARANG/JASA PADA LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROPINSI SUMATERA BARAT**

Heljapri
FakultasEkonomiUniversitasNegeri Padang
Jl. Prof. Dr. HamkaKampus Air Tawar Padang
Email :heljapri1005@yahoo.com

ABSCTRACT

This study aimed to examine the differences in perception between the Parties Internal Auditor Government Agencies with BPKP about aspects of the causes of fraud procurement of goods / services on the environment in the Government of West Sumatra Province who get financial statements in 2012 with a qualified opinion (WDP) is based on : 1) the quality of the committee procurement of goods / services , 2) quality provider of goods / services , 3) income committee procurement of goods / services , 4) systems and procedures for procurement of goods / services , 5) ethical procurement of goods / services , 6) environmental procurement of goods / services .

This research is a comparative study . The population in this study is the district / city to get financial statements in 2012 with WDP in West Sumatra . The sample in this study was 11 regencies / cities and Auditor BPK in West Sumatra . Data is primary data obtained directly from government agencies and auditors BPKP West Sumatra Province . The data analysis technique used is the technique of analysis of different test (t-test) to measure the difference between the Parties Internal Auditor Government Agencies with BPKP about aspects of the causes of fraud procurement of goods / services on Environment Government Agencies In West Sumatra Province .

The results showed : 1) there is no difference in the quality aspects of the procurement committee of goods / services . 2) there is no difference in the quality aspects of the procurement provider of goods / services . 3) there is a difference in the ethical aspects of the procurement of goods / services . 4) there is no difference on the environmental aspects of procurement of goods / services .

The government should be memperhatian process the procurement of goods / services in order to more easily minimized fraud action and do early prevention . 2) For further research should use additional variables related to fraud in the procurement of goods / services in order to interpret the government of fraud in the procurement of goods / services of the government itself . 3) for further research is expected to expand the area of research , so that the results obtained more leverage and can provide a clearer picture of the causes of fraud aspects of procurement of goods / services in government institutions as a whole .

**PERBEDAAN PERSEPSI ANTARA PIHAK INTERNAL INSTANSI
PEMERINTAH DENGAN AUDITOR BPKP TENTANG ASPEK PENYEBAB
FRAUD PENGADAAN BARANG/JASA PADA LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROPINSI SUMATERA BARAT**

Heljapri
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Padang
Email : heljapri1005@yahoo.com

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menguji perbedaan Persepsi antara Pihak Internal Instansi Pemerintah dengan Auditor BPKP tentang aspek penyebab *fraud* pengadaan barang/jasa pada lingkungan Pemerintah di Propinsi Sumatera Barat yang mendapatkan laporan keuangan tahun 2012 dengan opini wajar dengan pengecualian (WDP) berdasarkan : 1) kualitas panitia pengadaan barang/jasa, 2) kualitas penyedia pengadaan barang/jasa, 3) penghasilan panitia pengadaan barang/jasa, 4) sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa, 5) etika pengadaan barang/jasa, 6) lingkungan pengadaan barang/jasa.

Jenis penelitian ini adalah penelitian komparatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota yang mendapatkan laporan keuangan tahun 2012 dengan opini WDP di Propinsi Sumatera Barat . Sampel dalam penelitian ini adalah 11 Kabupaten/Kota dan Auditor BPKP di Sumatera Barat. Data merupakan data primer yang diperoleh langsung dari instansi pemerintah dan Auditor BPKP Propinsi Sumatera Barat. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis uji beda (uji-t) untuk mengukur perbedaan antara Pihak Internal Instansi Pemerintah dengan Auditor BPKP tentang aspek penyebab *fraud* pengadaan barang/jasa pada Lingkungan Instansi Pemerintah Di Propinsi Sumatera Barat.

Hasil penelitian menunjukkan : 1) tidak terdapat perbedaan pada aspek kualitas panitia pengadaan barang/jasa . 2) tidak terdapat perbedaan pada aspek kualitas penyedia pengadaan barang/jasa. 3) terdapat perbedaan pada aspek etika pengadaan barang/jasa. 4) tidak terdapat perbedaan pada aspek lingkungan pengadaan barang/jasa.

Pemerintah sebaiknya lebih memperhatikan proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa agar tindakan *fraud* lebih mudah diminimalisir dan dilakukan pencegahan secara dini. 2) Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan variabel tambahan yang berkaitan dengan *fraud* dalam sistem pengadaan barang/jasa pemerintah agar dapat menginterpretasikan *fraud* dalam sistem pengadaan barang/jasa pemerintah itu sendiri. 3) bagi Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas daerah penelitian, sehingga hasil yang diperoleh lebih maksimal dan lebih dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai aspek penyebab terjadinya *fraud* pengadaan barang/jasa pada lingkungan instansi pemerintah secara menyeluruh.

1. PENDAHULUAN

Dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemerintah harus memenuhi kebutuhan masyarakatnya seperti menggunakan APBD/APBN dengan sebaik-baiknya misalnya melalui pengadaan barang/jasa. Menurut Schiavo-Campo dan Sundaram (2000) dalam Sartono (2006) mendefinisikan pengadaan barang/jasa pemerintah (government procurement) adalah: *The acquisition of goods, services, and public works in a timely manner that result in best value to the government and the people.* (perolehan barang, jasa dan prasarana umum dalam waktu tertentu yang menghasilkan nilai terbaik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat).

Namun dengan banyaknya pengadaan barang/jasa demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Pemerintah Indonesia sering dihadapkan dengan kasus-kasus kecurangan atau yang sering disebut dengan *fraud*. Kasus *fraud* yang sering terjadi seperti kasus penyelewengan dana APBD/APBN, penggelembungan anggaran (mark-up), korupsi dan berbagai macam kasus pelanggaran lainnya yang dapat merugikan negara, potensi dan kekurangan penerimaan negara. Kasus-kasus tersebut marak terjadi baik pada pemerintah pusat maupun pada tingkat pemerintah daerah.

The Institute of Intenal Auditor America dalam Amin Widjaya (1992:17), mendefenisikan kecurangan mencakup suatu kesatuan ketidak beresan (*irregulation*) dan tindakan *ilegal* yang dicirikan dengan manipulasi yang disengaja, dilakukan untuk manfaat dan/atau kerugian organisasi oleh orang luar atau dalam organisasi. *Fraud* merupakan kejahatan tersembunyi, tidak ada yang dilakukan secara terang-terangan, tidak ada korban yang segera menyadari bahwa *fraud* telah terjadi. Para ahli memperkirakan bahwa *fraud* yang terungkap merupakan sebagian kecil dari seluruh *fraud* yang sebenarnya terjadi. Tindakan korupsi adalah bentuk

kecurangan yang umumnya terjadi baik dalam bidang perbankan ataupun pelayanan publik (Wilopo, 2006).

Terdapat berbagai bentuk *fraud* yang terjadi di sektor publik, baik yang berupa korupsi (*Corruption*), penyalahgunaan asset (*Asset Misappropriation*), maupun *Fraudulent Statements*. Kecurangan seperti yang telah dijelaskan di atas telah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi (sesuai yang telah disebutkan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang No. 20 tahun 2001 yang menyatakan bahwa perbuatan curang dan perbuatan yang merugikan keuangan negara merupakan jenis-jenis tindak pidana korupsi).

Sebagaimana kita dapat melihat dari tahun ke tahun kasus *fraud* dalam bidang keuangan baik yang berasal dari Instansi Pemerintah (contohnya Dinas Pemerintahan Kota ataupun Dinas Pemerintahan Propinsi) maupun Instansi Swasta (contohnya Bank dan perusahaan-perusahaan swasta lainnya) selalu menjadi bahan pembicaraan hangat di kalangan masyarakat luas.

Ada berbagai macam *fraud* telah terjadi di lingkungan Instansi Pemerintah dan berlangsung secara terus-menerus dari tahun ke tahun dan tiada henti. Salah satu jenis *fraud* yang paling banyak menimbulkan sumber kebocoran keuangan adalah *fraud* dalam bidang pengadaan barang/jasa.

Pengadaan barang/jasa memang masih menjadi faktor yang sangat rentan terhadap korupsi. Meskipun Pemerintah melalui Ketentuan pokok pengadaan barang/jasa pemerintah yang saat ini berlaku adalah Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Dalam Keppres tersebut sebenarnya sudah diatur dengan jelas mengenai pengadaan barang/jasa agar pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa dapat berjalan dan dilakukan dengan lebih transparan dan

akuntabel, namun tidak sedikit kasus *fraud* pengadaan barang/jasa yang terjadi, Setiap tahun Badan Pengawas Keuangan (BPK) maupun Kantor Pemberantasan Korupsi (KPK) selalu melaporkan adanya kasus dalam pengadaan barang/jasa yang mengandung unsur tindak pidana korupsi. (Solusi maret 2012 No.1 Vol.2)

Seperti yang dapat kita lihat pada kasus pengadaan alat-alat simulator ujian SIM di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengatakan kerugian Negara atas proyek pengadaan simulator SIM di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, sebesar Rp 121 miliar dan KPK menetapkan Djoko sebagai tersangka kasus simulator SIM (Padang Ekspres Senin 2 april 2013) dan pengadaan barang/jasa al quran dan labor komputer di kementerian agama (kemenag). (Padang Ekspres 18 mei 2013).

Menurut Sartono (2006) dalam Jatiningtyas (2011), terdapat 6 faktor yang mendorong terjadinya *fraud* pengadaan barang/jasa di lingkungan instansi pemerintah, yaitu (1).kualitas panitia pengadaan barang / jasa, (2).kualitas penyedia barang/jasa, (3).penghasilan panitia pengadaan barang/jasa, (4).sistem dan prosedur pengadaan barang / jasa, (5).etika pengadaan barang / jasa, dan (6).lingkungan pengadaan barang / jasa.

Untuk mengungkap *fraud* maka dibutuhkan pihak yang berkompeten dan independen untuk mengaudit. Pihak-pihak yang berkompeten seperti pihak internal Auditor Pemerintah (Inspektorat) dan Pihak Eksternal Auditor BPKP.

Wilopo (2006) menjelaskan bahwa pengendalian internal sangat penting, antara lain untuk memberikan perlindungan bagi entitas terhadap kelemahan manusia serta untuk mengurangi kemungkinan kesalahan dan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan (Boynton dan Kell, 1996 : 253) Pihak Internal Pemerintah (Inspektorat) berfungsi

sebagai internal Audit Pemerintah dan merupakan sumber informasi yang penting bagi pihak Auditor BPKP dan menjadi ujung tombak untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, sebab hasil Audit yang berkualitas merupakan sumber informasi penting dalam memberikan keyakinan kepada Pihak Pemerintah.

Pengelolaan keuangan Pemerintah yang baik harus didukung Audit Sektor Publik yang berkualitas, jika kualitas Audit Sektor Publik rendah, maka kemungkinan memberikan kelonggaran terhadap Lembaga Pemerintah melakukan kecurangan. Selain itu juga mengakibatkan risiko tuntutan hukum (legitimasi) terhadap Aparatur Pemerintah yang melaksanakannya.

Dalam Basuki dan Krisna (2006) menyatakan bahwa kualitas Audit merupakan suatu isu yang kompleks, karena begitu banyak faktor yang dapat mempengaruhi kualitas Audit, yang tergantung dari sudut pandang masing-masing pihak. Hal tersebut menjadikan kualitas Audit sulit pengukurannya, sehingga menjadi suatu hal yang sensitif bagi perilaku individual yang melakukan Audit. Kualitas pekerjaan Auditor biasanya dihubungkan dengan kualifikasi keahlian, ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan, kecukupan bukti pemeriksaan yang kompeten pada biaya yang paling rendah serta sikap independensinya. Kualitas Audit sebagai “probabilitas seorang Auditor dapat menemukan dan melaporkan *fraud*.”

Kualitas Audit yang baik akan memberikan konsekuensi bagi Auditor, salah satu bentuk konsekuensi tersebut adalah kepuasan Auditor. Dalam melakukan penilaian pihak Internal Instansi Pemerintah dengan Auditor BPKP terhadap *fraud* mungkin saja terjadi perbedaan. Hal ini disebabkan karena latar belakang pendidikan dan pengetahuan antara pihak internal instansi pemerintah dengan Auditor BPKP yang berbeda, pengalaman kerja antara

Pihak Internal Instansi Pemerintah dengan Auditor BPKP yang berbeda. serta antara Pihak Internal Instansi pemerintah dengan Auditor BPKP melihat dari sudut pandang yang berbeda.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nurani Jatiningtyas (2011) yang menguji pengaruh faktor-faktor *fraud* seperti Kualitas Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Kualitas Penyedia Barang/Jasa, Penghasilan Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa, Etika Pengadaan Barang/Jasa, dan Lingkungan Pengadaan Barang/Jasa terhadap *Fraud* dalam Pengadaan Barang/Jasa pada Instansi Pemerintah serta menguji apakah ada perbedaan penilaian antara Responden Pihak Internal Instansi dan Auditor BPKP.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam penilaian terhadap factor-faktor *fraud*, kecuali pada variabel Penghasilan Panitia Pengadaan. Selanjutnya, pengujian serempak/simultan yang dilakukan tentang factor-faktor *fraud* berpengaruh signifikan terhadap *Fraud* dalam Pengadaan barang/jasa pada Instansi Pemerintah. Namun pengujian yang dilakukan secara keseluruhan/gabungan hanya variabel Kualitas Penyedia dan Lingkungan Pengadaan yang berpengaruh secara negatif terhadap *fraud* dalam proses kegiatan pengadaan barang/jasa.

Sedangkan pengujian secara terpisah, berdasarkan responden dari Pihak Internal Instansi Pemerintah, tidak ada satu pun variabel independen yang berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. namun berdasarkan responden dari Auditor BPKP, variabel independen yang berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen adalah variabel Kualitas Panitia Pengadaan yang berpengaruh secara positif terhadap *fraud* dalam sistem pengadaan barang/jasa, Kualitas Penyedia berpengaruh secara negatif terhadap *fraud* dalam sistem pengadaan barang/jasa, dan

Lingkungan Pengadaan Barang/Jasa juga berpengaruh secara negatif terhadap *fraud* dalam sistem pengadaan barang/jasa.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang penulis memberi judul. “ **Perbedaan Persepsi Antara Pihak Internal Instansi Pemerintah dengan Auditor BPKP Tentang Aspek Penyebab *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa pada Lingkungan Pemerintah Propinsi di Sumatera Barat**”

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Apakah ada perbedaan persepsi antara Pihak Internal Instansi Pemerintah dengan Auditor BPKP Tentang aspek penyebab *fraud* pengadaan barang/jasa pada lingkungan instansi pemerintah Kab/Kota di Propinsi Sumatera Barat

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai:

1. Apakah ada perbedaan persepsi antara Pihak Internal Instansi Pemerintah dengan Auditor BPKP Tentang Aspek penyebab *fraud* pengadaan barang/jasa pada Lingkungan Instansi Pemerintah Kab/Kota di Propinsi Sumatera Barat.

Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, yaitu:

1. Bagi kalangan mahasiswa dan akademis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan menjadi salah satu sumber informasi dalam melakukan penelitian lebih lanjut mengenai aspek *fraud*.
 - b. Bagi mahasiswa dan akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong guna meningkatkan rasa kepedulian terhadap keuangan Negara agar efektif, efisien dan ekonomis.

2. Bagi kalangan Pembuat Peraturan :
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi kalangan Pembuat Peraturan.
3. Bagi kalangan Instansi Pemerintah :
 - a. Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumber bahan pertimbangan agar jika ada penyimpangan yang terjadi dalam proses Pengadaan Barang/Jasa dapat dideteksi lebih awal.
 - b. Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumber bahan pertimbangan guna memperbaiki sistem pengawasan dan pengendalian dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.

2. KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1 Teori Keagenan

Menurut Lane (2000) dalam *Anonymous* (2009) teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik. Ia menyatakan bahwa negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan prinsipal-agen (Lane, 2000: 12-13). Misalnya, dalam hubungan keagenan di pemerintahan antara eksekutif dan legislatif, eksekutif adalah agen dan legislatif adalah prinsipal (Halim, 2002 dalam *Anonymous*, 2009). Seperti dikemukakan sebelumnya,

2. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Schiavo-Campo dan Sundaram (2000) dalam Sartono (2006) mendefinisikan pengadaan barang/jasa pemerintah (government procurement) sebagai :

The acquisition of goods, services, and public works in a timely manner that result in best value to the government and the people. (perolehan barang, jasa dan prasarana umum dalam waktu tertentu yang menghasilkan nilai terbaik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat).

a. Tujuan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah

Menurut Keppres No. 80 Tahun 2003, Indonesia mengemukakan bahwa terdapat beberapa tujuan dalam sistem pengadaan barang/jasa pemerintah, yaitu :

1. Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri.
2. Meningkatkan peran serta usaha kecil termasuk koperasi kecil dan kelompok masyarakat dalam pengadaan barang/jasa.
3. Meningkatkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan.
4. Menumbuhkembangkan peran serta usaha nasional.

b. Prinsip Umum Pengadaan barang / jasa pemerintah

prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 adalah :

1. Efisien
2. Efektif
3. Terbuka dan Bersaing
4. Transparan
5. Adil dan tidak diskriminatif
6. Akuntabel

3. Garis Besar Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia

a. Landasan Hukum

Beberapa ketentuan yang dijadikan landasan hukum yang mengatur ketentuan pokok sistem pengadaan barang/jasa di Indonesia selama ini, antara lain: (1) Keppres No.29 Tahun 1984, 2) Keppres No. 16 tahun 1994. 3) Keppres No. 18 tahun 2000. 4) Keppres No. 80 Tahun 2003. 5) Keppres No. 61 Tahun 2004. 6) Perpres No. 32 Tahun 2005. 7) Perpres No. 70 Tahun 2005. 8) Perpres No. 8 Tahun 2006. 9)Perpres No. 79 Tahun 2006. 10) Perpres No. 85 Tahun 2006. 11) Perpres No. 95 Tahun 2007. 12)Perpres No. 54 Tahun 2010

b. Pihak yang terkait dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah

Para pihak (subyek) dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu :

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
2. Pengguna Anggaran
3. Kuasa Pengguna Anggaran
4. Penyedia Barang/Jasa
5. Panitia Pengadaan
6. Unit Layanan Pengadaan (*Procurement*)
7. Pejabat Pengadaan

c. Prinsip, cara, dan metode pengadaan barang/jasa pemerintah

Menurut Perpres No. 54 Tahun 2010 (terbaru) pasal 5, pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a).Efisien,
- b).Efektif,
- c).Transparan,
- d).Terbuka,
- e).Bersaing,
- f).Adil/tidak diskriminatif, g).Akuntabel.

Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa terdapat 4(empat) metode, yakni sebagai berikut: a).Pelelangan Umum, b).Pelelangan Terbatas, c).Pemilihan Langsung, d).Penunjukan Langsung.

4. Pengertian dan jenis *Fraud* dalam pengadaan barang/jasa

a. Pengertian *Fraud* (kecurangan)

Federal Bureau of Investigation (FBI) dalam Sinaga (2008) memberikan pemSaparan tetapi definisi yang bermanfaat bahwa memasukkan edasar yang diakui lebih dari satu abad :

Those illegal acts which are characterized by deceit, concealment, or violation of trust and which are not dependent upon the application of threat of physical force or violence. Individuals and organizations commit these acts to obtain money, property or service; to avoid the payment or loss of money or services; or to secure personal or business advantage

Yang diterjemahkan (tidak resmi), kecurangan adalah

Tindakan-tindakan ilegal yang ditandai dengan penipuan, menyembunyian, atau pelanggaran kepercayaan dan yang mana tidak tergantung pada penerapan ancaman kekerasan fisik atau kekerasan. Individu dan organisasi melakukan tindakan-tindakan tersebut untuk mendapatkan uang, properti atau layanan, untuk menghindari pembayaran atau kehilangan uang atau jasa, atau untuk mengamankan keuntungan pribadi atau bisnis

b. Klasifikasi *Fraud* (Secara Umum)

Berdasarkan bagan *Uniform Occupational Fraud Classification System* tersebut, The ACFE membagi *Fraud* (Kecurangan) dalam 3 (tiga) jenis atau tipologi berdasarkan perbuatan yaitu:

1. Penyimpangan atas asset (*Asset Misappropriation*);
2. Pernyataan palsu atau salah pernyataan (*Fraudulent Statement*);
3. Korupsi (*Corruption*).

c. Beberapa Jenis *Fraud* Dalam Pengadaan Barang/Jasa

- a. Ketidak sesuaian antara barang/jasa yang diperjanjikan dalam kontrak dengan kebutuhan instansi dan/atau masyarakat, baik dilihat dari jenis, kualitas maupun kuantitas barang/jasa.
- b. Ketidak sesuaian antara spesifikasi teknis barang/jasa yang telah diselesaikan oleh penyedia barang/jasa dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam perjanjian/kontrak.
- c. Ketidak sesuaian antara volume (kuantitas) barang/jasa yang telah diselesaikan oleh penyedia barang dengan jumlah yang seharusnya sesuai perjanjian/kontrak.
- d. Ketidak wajar harga barang/jasa yang disepakati dalam kontrak/perjanjian. Misalnya pengadaan peralatan komputer yang jauh di atas harga peralatan sejenis di pasaran karena mengandung unsur penggelembungan harga (mark-up)

- e. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan oleh rekanan dari jadwal waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian/kontrak.

1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya *Fraud* Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

- a. Kualitas Panitia Pengadaan
- b. Kualitas Penyedia Barang/Jasa
- c. Penghasilan Panitia Pengadaan
- d. Ketentuan mengenai Sistem dan
- e. Prosedur Pengadaan Barang/Jasa
- f. Etika Pengadaan Barang/Jasa
- g. Lingkungan Pengadaan (environment) Barang/Jasa

AICPA (1947) dalam Wilopo (2006) menjelaskan bahwa pengendalian internal sangat penting, antara lain untuk memberikan perlindungan bagi entitas terhadap kelemahan manusia serta untuk mengurangi kemungkinan kesalahan dan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan (Boynton dan Kell, 1996 : 253).Lingkungan eksternal meliputi semua hal yang berkaitan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Nurani Jatiningtias (2011). Dalam penelitiannya, Nurani Jatiningtias (2011) meneliti mengenai analisis factor-faktor yang mempengaruhi *fraud* pengadaan barang/jasa pada lingkungan instansi pemerintah di wilayah semarang,. Melalui penelitian ini, ditemukan bukti bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam penilaian terhadap Kualitas Panitia Pengadaan, Kualitas Penyedia, Sistem dan Prosedur Pengadaan, Etika Pengadaan, dan Lingkungan Pengadaan terhadap *fraud* dalam Pengadaan Barang/Jasa, namun tidak pada variabel Penghasilan Panitia Pengadaan.

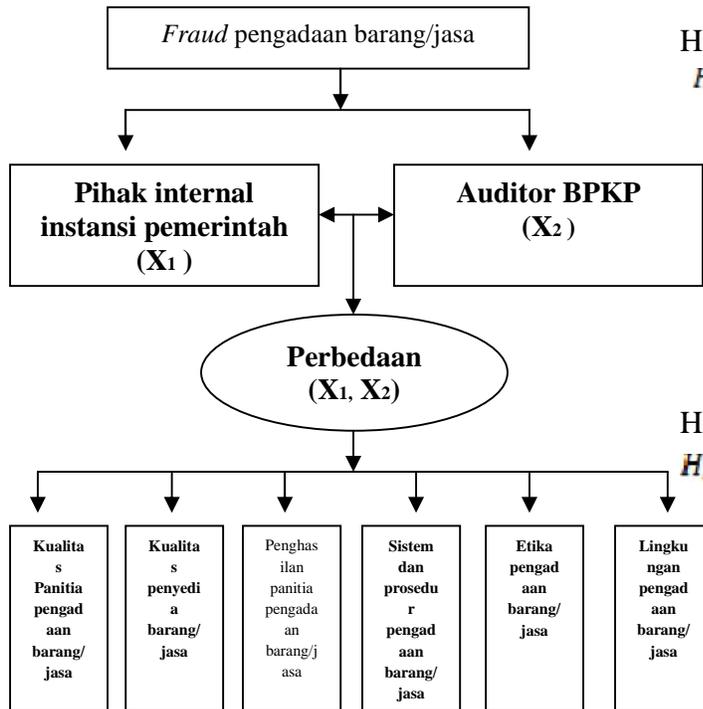
Selanjutnya, baik pengujian serempak/simultan yang dilakukan secara keseluruhan/gabungan dan secara terpisah,

diketahui bahwa Kualitas Panitia Pengadaan, Kualitas Penyedia, Penghasilan Panitia Pengadaan, Sistem dan Prosedur Pengadaan, Etika Pengadaan, dan Lingkungan Pengadaan secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap *Fraud* dalam Pengadaan barang/jasa pada Instansi Pemerintah.

Terakhir, pada pengujian yang dilakukan secara keseluruhan/gabungan hanya variabel Kualitas Penyedia dan Lingkungan Pengadaan yang berpengaruh secara negatif terhadap *fraud* dalam proses kegiatan pengadaan barang/jasa. Sedangkan jika pengujian dilaksanakan secara terpisah, berdasarkan responden dari pihak internal instansi, tidak ada satu pun variabel independen yang berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Sedangkan berdasarkan responden dari Auditor BPKP, variabel independen yang berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen adalah variabel Kualitas Panitia Pengadaan yang berpengaruh secara positif terhadap *fraud* dalam sistem pengadaan barang/jasa, Kualitas Penyedia berpengaruh secara negatif terhadap *fraud* dalam sistem pengadaan barang/jasa, dan Lingkungan Pengadaan Barang/Jasa juga berpengaruh secara negatif terhadap *fraud* dalam sistem pengadaan barang/jasa.

C. Kerangka Konseptual

Gambar berikut :



D. Pengembangan Hipotesis

Dalam Penelitian ini menggunakan pengembangan hipotesis yakni secara komparatif, yakni hipotesis yang memperbandingkan penilaian/persepsi tiap variabel dalam penelitian ini seperti (kualitas panitia pengadaan barang/jasa, kualitas penyedia barang/jasa, penghasilan panitia pengadaan barang/jasa, sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa, etika pengadaan barang/jasa, lingkungan pengadaan barang/jasa antara Responden dari Pihak Internal Instansi dengan Responden dari Auditor BPKP.

1. Hipotesis Komparatif

Hipotesis 1

H_a : Terdapat perbedaan persepsi dalam Kualitas Panitia Pengadaan Barang/Jasa antara Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Tim

Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa (Pihak Internal Instansi) dengan Auditor BPKP

Hipotesis 2

H_a : Terdapat perbedaan persepsi dalam Kualitas Penyedia Barang/Jasa terhadap Penyimpangan dalam Barang/Jasa, antara Kualitas Penyedia Pengadaan Barang/Jasa dan Tim Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa (Pihak Internal Instansi) dengan Auditor BPKP

Hipotesis 3

H_a : Terdapat perbedaan persepsi dalam penghasilan panitia pengadaan Barang/Jasa terhadap Penyimpangan dalam Barang/Jasa, antara penghasilan panitia pengadaan Barang/Jasa Tim Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa (Pihak Internal Instansi) dengan Auditor BPKP.

Hipotesis 4

H_a : Terdapat perbedaan persepsi dalam sistem dan prosedur pengadaan Barang/Jasa terhadap Penyimpangan dalam Barang/Jasa, antara sistem dan prosedur pengadaan Barang/Jasa Tim Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa (Pihak Internal Instansi) dengan Auditor BPKP

Hipotesis 5

H_a : Terdapat perbedaan persepsi dalam etika pengadaan Barang/Jasa terhadap Penyimpangan dalam Barang/Jasa, antara etika pengadaan Barang/Jasa Tim Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa (Pihak Internal Instansi) dengan Auditor BPKP.

Hipotesis 6

H_a : Terdapat perbedaan persepsi dalam lingkungan pengadaan Barang/Jasa terhadap Penyimpangan dalam Barang/Jasa, antara lingkungan pengadaan Barang/Jasa Tim Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa (Pihak Internal Instansi) dengan Auditor BPKP.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian komparatif.

B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pihak Instansi Pemerintah Kab/Kota Propinsi Sumatera Barat dan Auditor BPKP Perwakilan Wilayah Propinsi Sumatera Barat.

Penarikan sampel dilakukan dengan menggunakan metode teknik *purposive sampling*,

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek. Yaitu data berupa tanggapan tertulis atas pertanyaan atau kuesioner.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data tersebut di peroleh secara langsung dari objek penelitian tersebut.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini dikumpulkan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada populasi penelitian ini. Kuesioner diberikan secara langsung ke alamat responden. Pengembalian kuesioner dijemput kembali sesuai kesepakatan pengembalian.

E. Variabel Penelitian

1. Variabel Endogen (Y)

Variabel endogen (Y) dalam penelitian ini adalah aspek penyebab *Fraud* pengadaan

barang/jasa pada lingkungan instansi pemerintah.

2. Variabel Eksogen (X_1, X_2)

variabel eksogen dalam penelitian ini adalah:

- Pihak internal instansi pemerintah (X_1)
- Auditor BPKP (X_2)

F. Pengukuran Variabel

Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan skala likert dengan lima alternatif jawaban dan masing-masing diberi skor yaitu: Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Ragu-Ragu (RR), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS).

G. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang disusun sendiri.

H. Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

Uji validitas dimaksudkan untuk mengetahui ketepatan instrumen dalam mengukur apa yang hendak diukur. Sebelum kuesioner dibagikan kepada responden, terlebih dahulu dilakukan uji pendahuluan terhadap kuesioner. Untuk uji validitas, maka digunakan rumus korelasi *Product Moment*, sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{N(\sum XY) - (\sum Y)(\sum X)}{\sqrt{\{N\sum X^2 - (\sum X)^2\}\{N\sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

(Arikunto, 2006:170)

2. Uji Reliabilitas

Setelah dilakukan pengujian validitas, selanjutnya akan dilakukan pengujian reliabilitas, yang tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, jika dilakukan pengukuran dua kali atau lebih. Instrumen dikatakan reliabel (andal) jika jawaban seseorang terhadap per-tanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Untuk uji reliabilitas digunakan rumus *Cronbach's Alpha*.

$$r = \left[\frac{k}{(k-1)} \right] \left[\frac{\sum \dagger b^2}{\dagger^2 t} \right]$$

(Arikunto, 2006:196)

I. Teknik Analisis Data

1. Analisis Deskriptif

a. Verifikasi Data

Verifikasi data yaitu memeriksa kembali kuesioner yang telah diisi oleh responden untuk memastikan apakah semua pertanyaan sudah dijawab lengkap oleh responden.

b. Menghitung Nilai Jawaban

Menghitung frekuensi dari jawaban yang diberikan responden atas setiap item pertanyaan yang diajukan.

Mengitung rata-rata skor total item dengan menggunakan rumus:

$$\frac{5SS+4S+3R+2TS+1STS}{15}$$

c. Menghitung nilai rata-rata jawaban responden.

$$\text{Mean} = \frac{\sum_{h=1}^n x_i}{n}$$

d. Menghitung nilai TCR masing-masing kategori jawaban dari deskriptif variabel.

$$\text{TCR} = \frac{R_s}{n} \times 100$$

2. Metode Analisis

a. Uji Hipotesis

Berdasarkan pada hasil verifikasi terhadap data yang diperoleh, maka jumlah hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ada emam hipotesis. Penelitian ini menggunakan uji perbedaan rata-rata semua hipotesis tersebut diuji dengan menggunakan alat analisa *one way ANOVA*. Uji ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata untuk dua kelompok sampel yang tidak berhubungan. Jika ada perbedaan, rata-rata manakah yang lebih tinggi.

Dalam menentukan tingkat signifikansi, pengujian menggunakan uji dua sisi dengan tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$. Tingkat signifikansi dalam hal ini berarti kita mengambil resiko salah dalam mengambil keputusan untuk menolak hipotesis yang benar sebanyak-banyaknya 5%.

Kriteria pengujian :

H_0 : diterima bila F hitung \leq F tabel

H_a : ditolak bila F hitung $>$ F tabel

b. Uji T (*T-test*)

Dalam penelitian ini metode analisis yang akan dibahas adalah uji beda (t-tes). Uji beda digunakan untuk mengetahui ada atau tidak adanya perbedaan (kesamaan) dalam kedua kelompok data penelitian tersebut. Pengujian hipotesis tentang perbedaan dua kelompok sampel dilakukan ketika ingin membandingkan atau membedakan rata-rata variabel kriterium dua kelompok sampel. Penelitian bermaksud menguji keadaan (sesuatu) yang terdapat dalam suatu kelompok dengan kelompok lain, dan menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan dengan antara masing-masing kelompok. Maka digunakan rumus uji beda (t-tes) berikut ini.

$$t = \frac{X_1 - X_2}{\sqrt{\frac{S_1 + S_2}{n_1 + n_2}}}$$

Setelah diperoleh nilai t dari rumus tersebut, dilanjutkan dengan membandinngkan nilai t-hitung dengan t-table. Jika t-hitung lebih besar dari t-tabel maka H_a diterima dan H_0 ditolak begitu juga sebaliknya. Jika t hitung lebih kecil dari t tabel maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

J. Definisi Operasional

1. Kualitas Panitia Pengadaan

Kualitas yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Pendekatan yang dikemukakan Goetsch dan Davis dalam Aziza, 2008 ini menegaskan bahwa kualitas bukan hanya menekankan

pada aspek hasil akhir yaitu, produk dan jasa. Tetapi juga menyangkut kualitas manusia, proses dan lingkungan. Sedangkan panitia pengadaan barang/jasa adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Dewan Gubernur BI/Pimpinan BHMN/Direksi BUMN/Direksi BUMD, untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa. Jadi yang dimaksud dengan kualitas panitia pengadaan barang/jasa di sini adalah apakah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/ Dewan Gubernur BI/Pimpinan BHMN/Direksi BUMN/Direksi BUMD, untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa tersebut telah memenuhi kriteria yang telah dipersyaratkan dalam peraturan yang telah ditetapkan.

2. Kualitas Penyedia Barang/ Jasa

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya kualitas yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Sedangkan penyedia barang/ jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya. Jadi yang dimaksud dengan kualitas penyedia barang/jasa di sini adalah apakah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya telah memenuhi kriteria yang telah dipersyaratkan dalam peraturan yang telah ditetapkan.

3. Penghasilan Panitia Pengadaan

Undang-undang Pajak Penghasilan (UU PPh) dalam Pasal 4 ayat 1 menjelaskan arti penghasilan yaitu: *Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Wajib pajak (WP) baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi*

atau menambah kekayaan WP yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun..."

4. Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/ Jasa

Dalam bukunya yang berjudul Sistem Akuntansi, Mulyadi (2001) berpendapat bahwa **sistem** adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok organisasi. Sedangkan prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi organisasi yang terjadi berulang-ulang. Jadi dapat disimpulkan bahwa suatu sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa terdiri dari jaringan prosedur dan urutan kegiatan klerikal atas proses pengadaan barang/jasa.

5. Etika Pengadaan Barang/Jasa

Pengertian Etika (Etimologi), berasal dari bahasa Yunani adalah Ethos||, yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan (custom). Etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin, yaitu Mos|| dan dalam bentuk jamaknya Mores||, yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik (kesusilaan), dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Etika yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah pengkajian sistem nilai-nilai yang berlaku terutama yang diberlakukan pada proses pengadaan barang/jasa.

6. Lingkungan Pengadaan Barang/ Jasa

Lingkungan yang dimaksud di sini adalah lingkungan kerja dimana proses pengadaan barang/jasa dilaksanakan. Menurut Nitisemito (1992) lingkungan kerja adalah sesuatu yang ada disekitar para pekerja dan dapat mempengaruhi dirinya

dalam menjalankan tugas yang dibebarkannya (dalam Khoiriyah, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum objek Penelitian

Jumlah populasi sasaran atau sampel pada penelitian ini adalah 11 Kabupaten/Kota di lingkungan instansi pemerintah Propinsi Sumatera Barat yang mendapatkan laporan keuangan dengan opini Wajar dengan Pengecualian (WDP) dan kantor Auditor BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Barat. Populasi atau sampel di lingkungan instansi pemerintah yang terdiri dari 393 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Setiap sampel masing-masing terdiri dari satu responden. Peneliti mengambil satu responden untuk setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Namun karena ada sebagian responden yang menolak untuk mengisi kuesioner. Dari 393 sampel pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut, kuesioner disebar sebanyak 393 dan diambil kembali hingga batas akhir pengumpulan data, kuesioner yang diterima kembali sebanyak 303 kuesioner.

Sementara pada kantor BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Barat kuesioner disebar sebanyak 65 buah dan diambil kembali pada waktu pengumpulan data yang sudah disepakati, dari 65 kuesioner yang disebar hanya 43 yang kembali.

B. Demografi Responden

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui beberapa karakteristik responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Karakteristik responden tersebut seperti.

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia Responden
2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Responden

C. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Kualitas Panitia Pengadaan Barang/Jasa

Berdasarkan Tabel distribusi frekuensi aspek kualitas panitia pengadaan barang/jasa antara Pihak Internal Instansi Pemerintah Propinsi dengan pihak Auditor BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Barat yang diteliti dari 303 pegawai bagian pengadaan barang/jasa pada Pihak Internal Instansi Pemerintah Propinsi Sumatera Barat dan 43 pegawai Auditor BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Barat yang diteliti, terdapat perbedaan persepsi yaitu 1,26% pada indikator integritas, 2,27% pada indikator kompetensi, 2,73% pada indikator objektivitas dan 2,66% pada Rata-rata TCR untuk aspek kualitas pengadaan barang/jasa.

2. Kualitas Panitia Pengadaan Barang/Jasa

Berdasarkan Tabel distribusi frekuensi aspek kualitas penyedia barang/jasa antara Pihak Internal Instansi Pemerintah Propinsi Sumatera Barat dengan Auditor BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Barat yang diteliti. dari 303 pegawai bagian pengadaan barang/jasa pada Pihak Internal Instansi Pemerintah Propinsi Sumatera Barat dan 43 pegawai Auditor BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Barat yang diteliti, terdapat perbedaan persepsi yaitu. 5,4% pada indikator Penyatuan Pemahaman, 2,1% pada indikator Sistem Pengadaan, 3,73% pada indikator Spesifikasi. 1,34% pada indikator Celah KKN dan 1,48% pada Rata-rata TCR untuk aspek kualitas penyedia barang/jasa.

3. Penghasilan Panitia Pengadaan Barang/Jasa

Berdasarkan Tabel distribusi frekuensi aspek Penghasilan Panitia Pengadaan Barang/Jasa antara Pihak Internal Instansi Pemerintah Propinsi Sumatera Barat dengan Auditor BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Barat yang diteliti, dari 303 pegawai bagian pengadaan barang/jasa pada

Pihak Internal Instansi Pemerintah Propinsi Sumatera Barat dan 43 pegawai Auditor BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Barat Perwakilan Propinsi Sumatera Barat yang diteliti, terdapat perbedaan persepsi yaitu. 4,33% pada indikator Gaji atau Imbalan, 3,79% pada indikator Moral dan Motivasi, 3,73% pada indikator Spesifikasi. 10,25% pada indikator Status Gaining dan 5,84% pada Rata-rata TCR untuk aspek Penghasilan Panitia Pengadaan Barang/Jasa.

4. Aspek Sistem Dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa

Berdasarkan Tabel distribusi frekuensi Aspek Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa antara Pihak Internal Instansi Pemerintah Propinsi Sumatera Barat dengan Auditor BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Barat yang diteliti. dari 303 pegawai bagian pengadaan barang/jasa pada Pihak Internal Instansi Pemerintah Propinsi Sumatera Barat dan 43 pegawai Auditor BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Barat yang diteliti, terdapat perbedaan persepsi yaitu. 3,18% pada indikator Landasan Hukum, 1,67% pada indikator dapat dimengerti. 0,94% Mengatur Hal-Hal yang Pasti. 4,32% pada indikator Kompetensi Secara Fair. 3,38% pada indikator Mekanisme *Feedback* dan *complaint*. 5,95% pada indikator menciptakan mekanisme *complaint*. 4,07% pada Rata-rata TCR untuk Aspek Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa.

5. Aspek Etika Pengadaan Barang/Jasa

Berdasarkan Tabel distribusi frekuensi aspek Etika Pengadaan Barang/Jasa antara Pihak Internal Instansi Pemerintah Propinsi Sumatera Barat dengan Auditor BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Barat yang diteliti, dari 303 pegawai bagian pengadaan barang/jasa pada Pihak Internal Instansi Pemerintah Propinsi Sumatera Barat dan 43 pegawai Auditor BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Barat Perwakilan Propinsi

Sumatera Barat yang diteliti, terdapat perbedaan persepsi yaitu. 5,32% pada indikator Sistem Persaingan Usaha, 3,33% pada indikator Penyalahgunaan Wewenang dan Korupsi. 0,11% pada indikator Praktek yang Tidak Sehat. 11,49% pada indikator mencegah terjadinya kolusi dan korupsi. 3,96% pada Rata-rata TCR untuk aspek Etika Pengadaan Barang/Jasa.

6. Lingkungan pengadaan barang/jasa

Berdasarkan Tabel distribusi frekuensi Lingkungan Pengadaan Barang/Jasa antara Pihak Internal Instansi Pemerintah Propinsi Sumatera Barat dengan Auditor BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Barat yang diteliti. dari 303 pegawai bagian pengadaan barang/jasa pada Pihak Internal Instansi Pemerintah Propinsi Sumatera Barat dan 43 pegawai Auditor BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Barat Perwakilan Propinsi Sumatera Barat yang diteliti, terdapat perbedaan persepsi yaitu. 1,15% pada indikator Kondisi Lingkungan Kerja, 3,22% pada indikator Supervisi/Kontrol. 0,23% pada indikator Kepedulian Masyarakat. 3,04% pada indikator tanggung jawab. 3,02% pada indikator fasilitas. 2,94% pada Rata-rata TCR untuk aspek Lingkungan Pengadaan Barang/Jasa.

D. Uji Instrumen Penelitian

1. Uji Validitas

Untuk melihat validitas dari masing-masing pernyataan dalam kuesioner, digunakan r-tabel sebesar 0,136 (n=303) dan (n=43). berikut ini *Corrected Item-Total Correlation* terkecil dari masing-masing aspek sesuai hasil pengolahan data:

Dari hasil pengolahan data nilai terkecil dari *Corrected Item-Total Correlation* untuk masing-masing instrument antara Pihak Internal Instansi Pemerintah dengan Auditor BPKP. Untuk instrumen kualitas panitia pengadaan barang/jasa diketahui nilai *Corrected Item-Total Correlation* terkecil Pihak Internal Instansi Pemerintah 0,447 dan

Auditor BPKP 0,504. instrumen kualitas penyedia barang/jasa Pihak Internal Instansi Pemerintah 0,376, dan Auditor BPKP 0,240. instrumen penghasilan panitia pengadaan barang/jasa Pihak Internal Instansi Pemerintah 0,320 dan Auditor BPKP 0,552. instrumen sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa Pihak Internal Instansi Pemerintah 0,275 dan Auditor BPKP, 0,138 instrumen etika pengadaan barang/jasa Pihak Internal Instansi Pemerintah 0,352 dan Auditor BPKP 0,248. instrumen lingkungan pengadaan barang/jasa Pihak Internal Instansi Pemerintah 0,366 dan Auditor BPKP 0,326.

2. Uji Reliabilitas

Untuk melihat reliabilitas dari masing-masing pernyataan dalam kuesioner, digunakan nilai *Cronbach's Alpha*. berikut ini memperlihatkan nilai *Cronbach's Alpha* dari masing-masing aspek sesuai hasil pengolahan data:

Dari hasil pengolahan data Pihak Internal Instansi Pemerintah dapat dilihat bahwa nilai *Cronbach's Alpha* untuk setiap aspek $> 0,6$ (kecuali untuk aspek Penghasilan Panitia Pengadaan Barang/Jasa) sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan pada kuesioner dapat diterima dan reliable kecuali untuk aspek Penghasilan Panitia Pengadaan Barang/Jasa.

Dari hasil pengolahan data Pihak Auditor BPKP dapat dilihat bahwa Dari nilai *Cronbach's Alpha* untuk setiap aspek $> 0,6$ (kecuali untuk aspek Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa) sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan pada kuesioner dapat diterima dan reliable kecuali untuk aspek Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa.

E. Uji Hipotesis dengan Uji Beda (Uji-T)

Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} . Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau

nilai $sig < 0,05$. maka dari hasil pengolahan data dapat dilihat:

1. Kualitas Panitia Pengadaan barang/jasa

Dari hasil Pengujian hipotesis yang dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} 1,723 dan t_{tabel} 1,960. Artinya $t_{hitung} < t_{tabel}$ dengan nilai signifikan $0,086 > 0,05$ Sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan tentang persepsi kualitas panitia pengadaan barang/jasa antara Pihak Internal Instansi Pemerintah dengan Auditor BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Barat. hipotesis ditolak.

2. Kualitas Penyedia Pengadaan barang/jasa.

Dari hasil Pengujian hipotesis yang dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} 0,878 dan t_{tabel} 1,960. Artinya $t_{hitung} < t_{tabel}$ dengan nilai signifikan $0,381 > 0,05$ Sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan tentang persepsi kualitas penyedia pengadaan barang/jasa antara Pihak Internal Instansi Pemerintah dengan Auditor BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Barat. hipotesis ditolak.

3. Etika Pengadaan barang/jasa

Dari hasil Pengujian hipotesis yang dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} 2,490 dan t_{tabel} 1,960. Artinya $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan nilai signifikan $0,013 < 0,05$ Sehingga dapat dinyatakan bahwa terdapat perbedaan persepsi etika pengadaan barang/jasa antara Pihak Internal Instansi Pemerintah Propinsi Sumatera Barat dengan Auditor BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Bara. hipotesis diterima

4. Lingkungan Pengadaan barang/jasa

Dari hasil Pengujian hipotesis yang dilakukan dengan membandingkan nilai

t_{hitung} 1,855 dan t_{tabel} 1,960. Artinya $t_{hitung} < t_{tabel}$ dengan nilai signifikan $0,064 < 0,05$ Sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi lingkungan pengadaan barang/jasa antara Pihak Internal Instansi Pemerintah Propinsi Sumatera Barat dengan Auditor BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Barat. hipotesis ditolak.

F. Hasil Pembahasan

1. Kualitas Panitia Pengadaan Barang/Jasa

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurani Jatiningtyas (2011) yang menguji perbedaan penilaian antara Responden Pihak Internal Instansi dan Auditor BPKP tentang faktor-faktor *fraud*. Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan responden dari pihak internal instansi, pada variabel kualitas panitia pengadaan barang/jasa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel aspek penyebab *fraud* pengadaan barang/jasa. namun berdasarkan responden dari Auditor BPKP, variabel kualitas panitia pengadaan barang/jasa berpengaruh secara signifikan terhadap aspek penyebab *fraud* dalam sistem pengadaan barang/jasa,

2. Kualitas penyedia pengadaan barang/jasa

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurani Jatiningtyas (2011) yang menguji perbedaan penilaian antara Responden Pihak Internal Instansi dan Auditor BPKP tentang faktor-faktor *fraud*. Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan responden dari pihak internal instansi, pada variabel kualitas penyedia barang/jasa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel aspek penyebab *fraud* pengadaan barang/jasa. namun berdasarkan responden dari Auditor BPKP, variabel kualitas penyedia barang/jasa berpengaruh secara signifikan terhadap

aspek penyebab *fraud* dalam sistem pengadaan barang/jasa,

3. Etika pengadaan barang/jasa

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurani Jatiningtyas (2011) yang menguji perbedaan penilaian antara Responden Pihak Internal Instansi dan Auditor BPKP tentang faktor-faktor *fraud*. Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan responden dari pihak internal instansi, pada variabel etika pengadaan barang/jasa berpengaruh secara signifikan terhadap variabel aspek penyebab *fraud* pengadaan barang/jasa. namun berdasarkan responden dari Auditor BPKP, variabel sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap aspek penyebab *fraud* dalam sistem pengadaan barang/jasa.

4. Lingkungan pengadaan barang/jasa

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurani Jatiningtyas (2011) yang menguji perbedaan penilaian antara Responden Pihak Internal Instansi dan Auditor BPKP tentang faktor-faktor *fraud*. Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan responden dari Pihak Internal Instansi Pemerintah, pada variabel etika pengadaan barang/jasa berpengaruh secara signifikan terhadap variabel aspek penyebab *fraud* pengadaan barang/jasa. namun berdasarkan responden dari Auditor BPKP, variabel lingkungan pengadaan barang/jasa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap aspek penyebab *fraud* dalam sistem pengadaan barang/jasa.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pengolahan data dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini telah mengkonfirmasi perbedaan persepsi antara Pihak Internal Instansi Pemerintah dengan

Pihak Auditor BPKP tentang aspek penyebab *fraud* pengadaan barang/jasa pada Lingkungan Instansi Pemerintah Propinsi Sumatera Barat seperti. Menurut Sartono (2006) dalam Jatiningtyas (2011), aspek penyebab *fraud* terdiri dari 6 aspek yaitu 1.Kualitas Panitia Pengadaan Barang/Jasa, 2.Kualitas Penyedia Barang/Jasa, 3.Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa, 4.Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa, 5.Etika Pengadaan Barang/Jasa, 6.Lingkungan Pengadaan Barang/Jasa.

Dari keenam aspek tersebut pada aspek Kualitas Panitia Pengadaan Barang/Jasa, aspek Kualitas Penyedia barang/jasa dan Lingkungan Pengadaan barang/jasa tidak perbedaan persepsi yang signifikan antara Pihak Internal Instansi Pemerintah dengan Pihak Auditor BPKP tentang penyebab *fraud* pengadaan barang/jasa. Sementara itu pada pada aspek Etika Pengadaan barang/jasa terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara Pihak Internal Instansi Pemerintah dengan Auditor BPKP tentang penyebab *fraud* pengadaan Barang/Jasa. dan pada aspek Penghasilan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan aspek Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa tidak diolah karena hasil *Cronbach's Alpha* < 0,6 Atau tidak reliable.

B. Keterbatasan

Meskipun peneliti telah merancang dan mengembangkan penelitian ini sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Keterbatasan teori/referensi tentang aspek penghasilan panitia pengadaan barang/jasa serta sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa sehingga kuesioner yang disusun tidak reliabel.
2. Penelitian ini dilakukannya hanya pada 11 dari 13 Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat yang laporan keuangan tahun 2012 dengan Opini wajar dengan Pengecualian (WDP) dan Kantor

Auditor BPKB Perwakilan Propinsi Sumatera Barat sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasi ke semua objek secara keseluruhan.

C. Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan terkait dengan hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Pihak Internal Instansi Pemerintah agar lebih meningkatkan kinerjanya agar dapat mendeteksi dan mencegah tindakan *fraud* sedini mungkin.
2. Untuk auditor BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Barat agar menjalankan peran dan tanggungjawabnya sebagaimana semestinya.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas daerah penelitian, sehingga hasil yang diperoleh lebih maksimal dan lebih dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai aspek penyebab terjadinya *fraud* pengadaan barang/jasa pada lingkungan instansi pemerintah secara menyeluruh.

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yang masih perlu revisi untuk selanjutnya antara lain :

1. Penelitian ini dilakukan hanya pada pemerintah Kabupaten dan Kota Se Sumatera Barat, jadi belum terlihat secara menyeluruh kinerja keuangan pemerintah daerah secara luas.
2. Penelitian ini masih terbatas pada alat pengukuran/rasio dari satu sumber saja, untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan perluasan alat pengukuran/rasio lainnya sebagai alat analisis kinerja keuangan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arens, A.A.Randal,J.Elder,MarkS. B. 2008. *Auditing dan Jasa Assuransi Pendekatan Terintegrasi Jilid 1*. Jakarta: Erlangga.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar : Edisi Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Hermiyeti. 2008. *Pengaruh Penerapan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang*. STEKPI Jakarta.
- Jatiningtyas, Nurani dan Dr. Endang Kiswara, SE, Msi, Akt. 2011. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fraud Pengadaan Barang/ Jasa Pada Lingkungan Instansi Pemerintah Di Wilayah Semarang*. FE UNDIP Semarang.
- Juwita, N. (2009). 35% APBN 2010 Berpotensi Korupsi : Selain mafia hukum yang tengah ramai dibicarakan, ada juga mafia tender yang mengembosi anggaran Negara setiap tahun. Media Indonesia, Kamis 3 Desember 2009
- Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Klitgaard, R, R. M. Abaroa dan H. L. P. 2002. *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia dan Partnership for Governance Reform in Indonesia
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Bagaimana Meneliti Dan Menulis Tesis*. Jakarta : Erlangga
- Lander, G H., V. J. Kimball, dan K. A. M. 2008. *Government Procurement Fraud*. www.nysscpa.org
- Keppres, Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KPK. 2009. *KONFLIK KEPENTINGAN : Panduan Penanganan Konflik Kepentingan bagi Penyelenggara Negara*. Jakarta : KPK
- Nurini jatiningtyas 2011, tentang analisis Faktor-Faktor yang pengaruhi *fraud* pengadaan barang/jasa pada lingkungan instansi pemerintah daerah Pemerintah Daerah wilayah.
- Rahmawati, N. K. 2010. *Pengaruh Karakteristik Personal Auditor Terhadap Tingkat Penerimaan Penyimpangan Perilaku Dalam Audit*. Universitas Trisakti, Jakarta
- Rieffel, L. dan K. Dharmasaputra. 2009. *Di Balik Korupsi Yayasan Pemerintah*. Jakarta : Freedom Institute
- Sartono. 2006. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyimpangan Pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Instansi Pemerintah*. *Tesis Tidak Diublikasikan*, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia
- Solusi maret, Tahun 2012 No.1 Vol.2 tentang Fraud (kecurangan)
- Sulistiyowati, T. 2007. *Pengaruh Kepuasan Gaji Dan Kultur Organisasi Terhadap Persepsi Aparatur Pemerintah Daerah Tentang Tindak Korupsi*. JAAI Vol. 11 No. 1, Juni 2007: 47-66
- Thai, K. V. 2001. *Public Procurement Re-examined*. *Journal Of Public Procurement*, Volume 1, Issue 1, 9-50
- Wilopo. 2006. *Analisis faktor-faktor yang berpengaruh Terhadap kecenderungan terjadinya kecurangan Akuntansi : Studi pada Perusahaan BUMN dan Publik di Indonesia*. Jakarta : Media Riset Akuntansi, auditing, dan Informasi.
- Koran Padang ekspress (Koran nasional dari Sumatera barat)